



Jurnal Yaqzhan, Vol. 10 No. 02, Desember 2024

Available online at

<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v10i2.18735

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin and Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
Indonesia

PEMIKIRAN OPOSISI NURCHOLISH MADJID DALAM BINGKAI POLITIK ISLAM

NURCHOLISH MADJID'S OPPOSITIONAL THINKING IN THE FRAME OF ISLAMIC POLITICS

Junaidi¹

Universitas AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta

junaidi.i@amikom.ac.id

Mulyadi Erman²

Universitas AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta

mulyadi.e@amikom.ac.id

Syafwan Rozi³

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

syafwanrozi@uinbukittingi.ac.id

ABSTRAK: Kepiawaian, keberanian dan ketajaman intelektual yang dimiliki Nurcholish Madjid mampu merubah dan mendorong terbentuknya mekanisme ide kelembagaan oposisi melalui peran partai politik. Partai oposisi adalah wujud moderasi dari ide demokrasi pancasila yang mengakui hak warga negara dalam tatanan sistem pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filsafat dan dalam teknik analisa menggunakan metode analisis hermeneutika kritis dan historis. Metode analisis kritis ini digunakan berangkat dari fakta bahwa objek kajian dalam penelitian ini adalah gagasan atau ide manusia yang tertuang dalam bentuk naskah atau karangan seseorang. Metode historis adalah metode penelitian yang didasarkan kepada asumsi bahwa semua gagasan manusia selalu berkembang dan terdapat ketidaksempurnaan berupa kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian menemukan bahwa era orde baru mendominasi kekuasaan negara dengan platform pancasila mampu mengintervensi rakyat Indonesia selama tiga puluh dua tahun dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Kemantapan stabilitas sebagai ruang untuk menunjang pengembangan tatanan sosial politik dalam usaha demokrasi dan keadilan sosial bagi masyarakat hilang sebagai kekuatan pemantau dan penyeimbang dalam tatanan moderasi demokrasi. Sehingga demokrasi yang sehat harus melahirkan check and balance sebagai wujud kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers dan sebagainya.

Kata Kunci: Oposisi, Politik Islam; Nurcholish; Orde Baru; Stabilitas.

ABSTRACT: Nurcholish Madjid's expertise, courage, and intellectual understanding were able to change and encourage the formation of an opposition institutional idea mechanism through the role of political parties. The opposition party is a form of moderation of the idea of Pancasila democracy that recognizes the rights of citizens in the order of the government system. This research is qualitative literature research with a philosophical approach and the analysis technique using critical and historical hermeneutic analysis methods. The historical method is a research method based on the assumption that all human ideas always develop and there are imperfections in the form of advantages and disadvantages. The results found that the new order era dominated state power, with the Pancasila platform able to intervene with the Indonesian people for thirty-two years under the leadership of President Soeharto. Stability as a space to support the development of socio-political order in the pursuit of democracy and social justice for the people was lost as a monitoring and balancing force in the order of democratic moderation so that a healthy democracy must give birth to checks and balances as a form of freedom of expression, academic freedom, freedom of the press and so on.

Keyword: Opposition; Islamic Politics; Nurcholish; New Order; Stability.



A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Para pemerhati politik Indonesia kontemporer pada umumnya mengisyaratkan sebuah paradoks bahwa Indonesia adalah contoh *par excellent* dari fenomena ketika mekanisme demokrasi dan eksistensi oligarki atau elitisme dapat saling mengisi atau hidup berdampingan pada saat bersamaan.¹

Nurcholish Madjid sebagai cendekiawan Muslim mendorong terbentuknya mekanisme *checks and balances* melalui pelembagaan oposisi melalui peran partai politik. Era Orde Baru yang dicirikan oleh tingginya dominasi kekuasaan negara terhadap rakyatnya, Nurcholish Madjid menilai bahwa kemantapan stabilitas harus memberikan ruang untuk melihat kembali apa tujuan hakiki stabilitas nasional, terutama terkait usaha menyiapkan pengembangan tatanan sosial-politik dalam usaha mewujudkan demokrasi dan keadilan sosial sesungguhnya. Dalam mewujudkan peran oposisi bagi demokrasi dalam kacamata Nurcholish Madjid sebagai persyaratan terbentuknya mekanisme *checks and balance* dalam sistem politik di Indonesia dengan memperbandingkan peran oposisi pada rezim Orde Baru, rezim Reformasi dan situasi politik saat ini.

Pola hubungan yang terjadi justru mengindikasikan kecenderungan relasi kartel politik, yakni di antara kedua lembaga itu cenderung bersikap saling menguntungkan, baik terselubung maupun manifes, yang pada akhirnya menyebabkan kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan secara efektif.² Jelas bahwa eksistensi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena masih memberikan tempat yang cukup lapang bagi munculnya praktik politik yang mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri.

Nurcholish Madjid sering disebut sebagai tokoh kontroversial dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan ide-ide barunya sebagai “Natsir Muda” dan pendapatnya yang sampai ke masyarakat selalu mendapat tantangan kritikan dan tuduhan serta inspirasi bagi tokoh-tokoh Islam bermacam-macam atas apa yang ia sampaikan. Tuduhan sekuler, kafir dan murtad menjadi hal yang biasa dialamatkan kepadanya. Akan

¹ Yuki Fukuoka, “Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics,” in *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 51, 2015, 480–82, <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1111792>.

² Marcus Mietzner, “Comparing Indonesia’s Party Systems of the 1950s and the Post-Suharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition,” *Journal of Southeast Asian Studies* 39, no. 3 (2008): 431–53, <https://doi.org/10.1017/S0022463408000337>.

tetapi sebagai pembaharu yang tulus Nurcholish Madjid tidak berhenti berbuat untuk masyarakat, terutama kalangan akademis.³

Sementara dalam aspek kontekstual ada satu jargon yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid *Islam yes Partai Islam No*. Konteks ini ketika era Orde Baru kehadiran partai politik hanya sebatas “roda bemo”, satu bannya berfungsi dan dua bannya pelengkap penderita yaitu partai PPP dan PDI era Orde Baru beda halnya dengan partai Golkar. Instrumen buruk ini dijadikan dasar pemikiran oleh Nurcholish Madjid dengan menyebut “Islam yes, partai Islam no”. Sindiran dan kritikan Nurcholish ditujukan bahwa eksistensi partai Islam hanya sebatas simbol belaka atau sebatas instrumen dalam berdemokrasi. Perubahan pemikiran Nurcholish berubah setelah reformasi bergulir dengan mengatakan “Islam yes, Partai Islam yes”. Jargon Nurcholish Madjid berubah karena ada harapan membangun suatu tatanan masyarakat madani yang sudah di citakannya setelah bangkitnya partai-partai Islam. Kehadiran dan bangkitnya banyak partai Islam setelah reformasi bagi Nurcholish Madjid bisa disebut sebagai harapan baru meskipun juga menjadi tantangan dan ancaman dalam dinamika partai Islam.

Dalam situasi seperti ini, penguatan eksistensi kekuatan penyeimbang yang notabene melekat pada kelompok oposisi menjadi perlu lebih diperhatikan dan secara fundamental merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, setidaknya untuk mengurangi praktik oligarki dengan segenap aspek buruk yang ditimbulkannya. Pembahasan mengenai oposisi di Indonesia tentu bukan persoalan baru.⁴ Studi Kroef (1977) dan Uhlin (1998), misalnya, telah membahas oposisi dengan cukup mendalam. Meskipun demikian, kajian keduanya lebih pada masa sebelum dan menjelang era reformasi. Kajian kekinian atau setidaknya yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini belum banyak dilakukan.

Analisis studi Deddy Supriady (2018) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, secara konstitusional mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan. Sejak era reformasi, sistem demokrasi Indonesia mengalami berbagai perbaikan dengan mengutamakan pembagian kekuasaan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip *check and balance*.⁵ Namun,

³ Arbiyah Lubis, “Sunnatullah Dalam Pandangan Harun Nasution Dan Nurcholish Madjid,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 02 (2012): 1, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i02.51>.

⁴ R William Liddle, “Review of Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia,” in *Indonesia*, ed. Edward Aspinall (Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2024), 175–79, <http://www.jstor.org/stable/40376421>.

⁵ Wardatul Mutmainnah and Siti Tiara Maulia, “Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya,” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 111–17, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.284>.

dinamika politik di era pemerintahan Joko Widodo menunjukkan adanya pergeseran. Bagi Mirza Satria Buana (2018) bahwa peran oposisi, yang sejatinya menjadi pengawas utama terhadap kinerja eksekutif, mengalami pelemahan signifikan. Parlemen, yang idealnya menjadi arena diskusi dan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, cenderung menunjukkan pola persetujuan yang berulang tanpa adanya kritik yang konstruktif.⁶

Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Oposisi berasal dari bahasa Latin *oppōnere*, yang mengandung arti menentang, menolak, melawan. Formulasi nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi pun itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok. Oposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Oposisi dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai kata “berlawanan”. Negara Inggris oposisi lahir dan tumbuh pertama kali di dalam parlemen ketika terdapat dua pihak yang saling berhadapan. Partai yang menang dalam pemilu bertindak sebagai pemegang kekuasaan, sebaliknya partai yang kalah bertindak sebagai oposisi di luar kekuasaan bertugas mengontrol dan mengkritik kekuasaan dan memberi alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa sehingga rakyat mempunyai pilihan kebijakan terbaik.⁷

Nurcholish Madjid menilai bahwa oposisi penting bagi demokrasi di Indonesia karena secara filosofis, manusia tidak mungkin akan selalu benar. Di dalam demokrasi yang sehat diperlukan *checks and balances*. Yaitu, adanya kekuatan pemantau dan pengimbang. Ada istilah oposisi loyal, yaitu semangat beroposisi kepada pemerintah, tetapi loyal pada negara. Inilah yang juga membedakan antara istilah oposisi dan oposisionalisme. Oposisionalisme itu negatif, karena dia hadir untuk menentang hanya sekedar menentang. Sifatnya sangat subyektif dan mungkin itikadnya kurang baik.

Oposisionalisme akan cenderung bersifat *ad hominem* atau menyerang berdasarkan sisi pribadi seseorang, yang jika berlanjut akan menjadi pembunuhan karakter (*character assassination*). Oposisi loyal merupakan langkah untuk mengantisipasi munculnya oposisionalisme.⁸

⁶ Benedictus Eric Hariyanto, Christophorus Rinovan Prasety Widi, and Paskalis Ronaldo, “Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke,” *Akademika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 24, no. 1 (2019): 48–60.

⁷ Munadi Munadi, “Oposisi Dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.726>.

⁸ Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan* (Paramadina, 1998).

Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, oposisi dianggap sesuatu yang sangat diperlukan, sebab oposisi menjalankan suatu fungsi yang sangat vital dan penting yaitu *check and balances*, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif.⁹ Tulisan ini berupaya mengupas bagian dari mengetengahkan kajian mengenai oposisi dan juga terutama apa yang harus dilakukan di kemudian hari dalam perspektif pemikiran Nurcholish Madjid.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif referensi kepustakaan (*library research*). Bahan dan materi penelitian meliputi antara lain; karya tulis pemikiran Nurcholish Madjid yang paling utama berkaitan dengan karyanya dari berbagai perspektif baik agama, politik, budaya dan sains. Buku-buku karya Nurcholish Madjid sejatinya memformulasikan bagaimana konsep oposisi dibangun sedemikian rupa sehingga demokrasi itu benar-benar memiliki value etik dan estetik.

Dalam penelitian oposisi ini sangat relevan memakai teori Fazlur Rahman yaitu teori penafsiran teori *double movement*. Teori Fazlur Rahman memiliki dua gerakan ganda. Pertama, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan al-Qur'an. Kedua, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi urgen karena al-Qur'an adalah respon ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian (*the prophet's mind*). Respon ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial-moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi.

Gerakan pertama terdiri dari dua tahap. Pertama, seorang penafsir harus memahami statemen al-Qur'an dengan mempelajari situasi historis atau problem yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general (dalam bahasa Rahman, situasi makro: agama, sosial, adat, institusi, perilaku). Kedua, melakukan generalisasi jawaban al-Qur'an terhadap situasi spesifik menjadi statemen moral-sosial yang bersifat general (keadilan, persamaan, kebebasan). Statemen moral-sosial ini disaring dari teks yang

⁹ Anthony Reid, "Political 'Tradition' in Indonesia: The One and the Many," *Asian Studies Review* 22, no. 1 (1998): 23–38, <https://doi.org/10.1080/10357829808713185>.

bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya background sosio-historis teks. Latar belakang inilah yang disebut dengan *rationes legis* dari ayat.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Oposisi Dalam Alam Demokrasi

Jika dihitung sejak tahun 1998, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun ke-26 pasca reformasi. Selama rentang waktu tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan setidaknya enam kali pemilihan umum (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024), entah untuk memilih anggota parlemen atau presiden beserta wakilnya. Di atas kertas, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat diklaim relatif damai dan berjalan lancar. Namun, dalam praksisnya terdapat aneka pertentangan dan konflik yang tumbuh di kalangan kontestan pemilihan umum, tetapi hal itu tidak memberi pengaruh signifikan dalam konstelasi politik di Indonesia.

Diskursus dan dinamika Islam berkaitan dengan demokrasi sesungguhnya sudah ada sebelum manusia diciptakan. Sejatinya, hal ini mengindikasikan bahwa pada prinsipnya manusia dibekali akal, rasa dan kehendak dalam proses penciptaannya. Dengan hal inilah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan dirinya sendiri. Dengan itu pula, manusia dipandang sebagai makhluk terpuji dan terhormat. Topik ini berusaha melakukan pembongkaran atas kesejatan ajaran politik dalam Islam dalam koridor hendak mencari kebenaran dan etika politik yang estetik.¹¹ Sebagai hasil dari pembongkaran ajaran politik itu, penulis berusaha menggagas “spiritualisasi” pemikiran politik Islam yang menegaskan ‘pluralisme kebebasan’ yang damai dan berkeadilan ala Nurcholish Madjid.

Media dan sarana oposisi dalam politik Islam merupakan suatu keniscayaan dan kenyataan. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan politik sebagai wujud hukum sunnatullah dan prinsip persamaan antar sesama manusia. Pola pemikiran Nurcholish Madjid dapat dilacak sejak gelombang pertama pembaruannya melalui ide “Islam yes, partai Islam no.” Di sini awalnya ia menyorot pemanfaatan simbol agama untuk

¹⁰ Fazlur Rahman, “THE RELIGIOUS SITUATION OF MECCA FROM THE EVE OF ISLAM UP TO THE HIJRA,” in *Islamic Studies*, vol. 16 (Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, 1977), 289–301, <http://www.jstor.org/stable/20847048>.

¹¹ Refly Setiawan, Melinda Esti, and Viktor V Sidorov, “Islam and Politics in Indonesia,” *RUDN Journal of Political Science* 22, no. 4 (2020): 731–40, <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740>.

kekuasaan. Kondisi memprihatinkan ini telah berlangsung lama, sementara di sisi lain cita-cita politik legalisme Islam masih bergulir.¹²

Lewat jargonnya itu, Nurcholish Madjid memangkas harapan utopia sejumlah aktivis Islam, seraya mendorong aktualisasi Islam non politik dengan menampilkan wajah kulturalnya. Gelombang kedua kontroversinya adalah ide sekularisasi, yang disalahpahami kebanyakan orang karena disamakan begitu saja dengan sekularisme. Pada tahap ini hujatan-hujatan bermunculan, sampai ada yang menuduh Nurcholish Madjid sebagai agen Barat yang membawa misi westernisasi. Dalam kesempatan lain Nurcholish Madjid selalu memberikan jawaban balik, seraya mengklarifikasinya. Tidak sangka lagi ia telah mengundang perhatian orang banyak, pemerhati Islam, dan pengamat sekaligus memberi kekuatan bagi tegaknya kebebasan intelektual yang berintegritas.

Untuk itu menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah negara mengklaim dirinya sebagai negara Islam tetapi isinya tidak Islami, atau dengan kata lain umat Islam tidak wajib mendirikan negara Islam, tetapi wajib melaksanakan nilai-nilai Islam termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu negara.¹³

2. Pelemahan Oposisi dalam Pemerintahan

Pelemahan oposisi dalam konteks pemerintahan Indonesia berdampak signifikan terhadap keseimbangan politik dan proses demokrasi. Oposisi yang lemah dapat mengurangi efektivitas mekanisme check and balance yang seharusnya mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Selain itu, pelemahan oposisi juga bisa mengakibatkan kurangnya kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Tanpa peran oposisi yang kuat, suara rakyat yang berbeda pendapat dengan pemerintah mungkin kurang terwakili, mengurangi dinamika demokrasi yang sehat dan berpotensi memperkuat dominasi satu partai atau kelompok politik tertentu.

¹² Yuyun Rohmawati, "ISLAM DAN NEO-MODERNISME/POST-MODERNISME (Perspektif Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid)," *Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2021): 60–71, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v20i1.4157>.

¹³ M. Amin Abdullah, "Nurcholish Madjid and Religious Pluralism in Indonesian Islam," in *Pluralism in Islamic Contexts - Ethics, Politics and Modern Challenges*, ed. Mohammed Hashas (Cham: Springer International Publishing, 2021), 189–99, https://doi.org/10.1007/978-3-030-66089-5_11.

Analisis Noviaty (2016) mengatakan bahwa beberapa kanal berita daring mengendus fenomena ini berdampak buruk bagi upaya atau proses *check and balance* yang profesional bagi penguasa.¹⁴ Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai instrumen pengawas penguasa menjadi mandul, sebab isi lembaga tersebut adalah kader-kader partai pendukung pemerintah, yang mau tidak mau juga mendukung aneka kebijakan pemerintah. Isu ini disinyalir dapat membuat pemerintah sebagai penguasa yang tidak terkontrol. Kondisi ini bisa menimbulkan risiko kebijakan yang dibuat tanpa melalui proses evaluasi yang matang, karena tidak ada kekuatan oposisi yang signifikan untuk menentang atau mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Lebih jauh, kondisi ini juga bisa memicu ketidakpuasan publik, karena suara yang berbeda atau kritik terhadap pemerintah tidak mendapat ruang yang layak dalam ranah politik. Akibatnya, demokrasi berpotensi tereduksi menjadi formalitas belaka, di mana pemerintah bisa menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol yang efektif dari lembaga legislatif yang seharusnya bersikap independen. Relevansi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan demokrasi kontemporer tetap sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya otoritarianisme. Dengan membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing cabang memiliki peran khusus dan dapat saling mengawasi agar tidak ada satu pihak yang memonopoli kekuasaan. Dalam konteks modern, pembagian kekuasaan juga relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti transparansi, korupsi, dan keterbukaan informasi. Pembagian kekuasaan memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan hukum, sekaligus menjaga dinamika demokrasi yang sehat. Hal ini juga memberikan ruang bagi keberagaman suara dan pendapat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Melemahnya peran oposisi di Indonesia selama era pemerintahan Joko Widodo memiliki implikasi serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan oleh John Locke sebagai kerangka analisis, penulis menemukan adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang tidak diimbangi dengan kekuatan oposisi yang efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun

¹⁴ Cora Elly Noviaty, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

secara formal pembagian kekuasaan masih berjalan, realitas politik di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga fungsi pengawasan yang seimbang.¹⁵

3. Oposisi dalam Politik Islam

Aspek etimologi, oposisi berasal dari Bahasa Inggris *opposition* (*opposites*) atau Bahasa Latin *opponere* yang berarti: menghadapkan, membantah, dan menyanggah. Sedangkan dari aspek terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oposisi diartikan sebagai partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.

Secara terminologis konsep oposisi secara substantif suatu perbuatan yang bersifat melawan atau menentang. Ditinjau dari segi lain adanya oposisi berarti pula adanya perbedaan pendapat atau pandangan mengenai satu atau beberapa hal. Hal ini dapat terjadi dalam bermacam-macam bidang kehidupan. Perbedaan pandangan atau pendapat di atas dapat pula terjadi dalam bidang politik. Apabila kita mengambil contoh Inggris yang menganut sistem dua partai, maka di dalam Parlemen atau *House of Commons* akan terdapat dua partai politik yang berpengaruh yaitu salah satu dari padanya menguasai mayoritas suara atau kursi di dalam lembaga negara di atas.¹⁷

Dalam hal partai politik yang menguasai mayoritas suara di atas Partai Konservatif umpamanya, maka partai politik inilah yang menguasai Pemerintah atau Kabinet. Ini berarti pula, bahwa Partai Konservatif tersebut menjadi pemerintah, sedangkan Partai Buruh akan menjadi partai oposisi, sebagai partai politik yang akan terus menerus melakukan pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah atau partai pemerintah. Apabila ada tindakan pemerintah atau partai pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, maka Partai Buruh akan bersikap menentang tindakan di atas.

Fahmi Huwaidi dalam *al-Islam wa al-Dimoqrathiyah* menegaskan bahwa oposisi yang benar dalam Islam bersifat loyal, konstruktif, dan reformatif. Dalam konteks politik Islam, oposisi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban syariah dan

¹⁵ Hariyanto, Widi, and Ronaldo, "Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke."

¹⁶ Willem van der Muur et al., "Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 379–96, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1669520>.

¹⁷ Mohammad Wahyu Adji Setio Budi, "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution : A Contemporary Developments," *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.

tanggung jawab moral.¹⁸ Islam memandang oposisi sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus bentuk nasihat agar kebijakan lebih adil dan maslahat. Oposisi menjadi bagian dari mandat rakyat untuk mengevaluasi, memberikan solusi, dan memperjuangkan keadilan, sementara pemerintah memiliki hak menegur rakyat jika terjadi penyimpangan. Dalam negara, oposisi harus berpijak pada konstitusi dan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan acap kali dianggap perlawanan, meskipun sejatinya itu adalah bagian dari proses demokrasi.

Sebagian pihak menganggap bahwa pelembagaan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi yang menganut sistem presidensil tidaklah tepat. Pihak ini menganggap pelembagaan oposisi hanyalah ada dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen membentuk kabinet, sementara partai sisanya menjadi oposisi. Berbeda dengan sistem presidensil yang dibangun bukan berdasarkan koalisi-koalisi tertentu. Dalam sistem presidensil, Presiden berhadapan dengan parlemen (DPR) sebagai sebuah satu-kesatuan, bukan dalam pecahan-pecahan partai pendukung dan partai oposan.¹⁹

Hans Daalder berasumsi bahwa di berbagai negara demokrasi modern masyarakat cukup mampu memproduksi kekuatan kekuatan pengontrol (*countervailing forces*), tetapi kekuatan oposisi di parlemen yang *powerfull* dapat menjaga pertanggung jawaban reguler dan menjamin suatu sistem tetap terbuka.²⁰

4. Pemikiran Oposisi Nurcholish Madjid

Sejalan dengan itu, Nurcholis Madjid mengatakan dalam negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan *check and balances* sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dalam pandangan yang agak filosofis manusia tak mungkin selalu benar. Adapun untuk menjalankan *check and balances* tersebut, maka secara formal di parlemen adalah partai oposisi. Walaupun pandangan Nurcholis Madjid ini terlihat dalam konteks oposisi struktural. Bagi Nurcholish Madjid oposisi tidak diperoleh

¹⁸ Huwaidi, Fahmi. *al-Islam wa al-Dimograthiyah*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1993.

¹⁹ Kuswanto Kuswanto, "Consistency of the Presidential System in Indonesia," *Sriwijaya Law Review (SLRev)* 2, no. 2 (2018): 170–82, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.67.pp170-182>.

²⁰ Arif Khan, Saiful Islam, and Muhammad Alam, "The Role of Political Opposition : A Pre-Requisite for Democracy," *Journal of Humanities, Social And Management Sciences (JHSMS)* 2, no. 1 (2021): 63–71, <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/2.1.6>.

hanya melalui *to oppose* (menentang) saja, tapi dalam oposisi juga terkandung unsur *to support* (mendukung).²¹

Lebih tegas Nurcholis Madjid mengatakan oposisi sangat berbeda dengan oposisionalisme yang sekedar menentang, sangat subjektif dan bahkan dengan itikad kurang baik, seperti kebiasaan mendaftar kesalahan orang lain. Bagi Nurcholis oposisi dalam semangat loyal, loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal.²²

Nurcholish Madjid menilai bahwa oposisi penting bagi demokrasi di Indonesia karena secara filosofis, manusia tidak mungkin selalu benar.²³ Di dalam demokrasi yang sehat diperlukan *check and balances*. Yaitu, adanya kekuatan pemantau dan pengimbang. Ada istilah oposisi loyal, yaitu semangat beroposisi kepada pemerintah, tetapi loyal pada negara. Inilah yang juga membedakan antara istilah oposisi dan oposisionalisme. Oposisionalisme itu negatif, karena dia hadir untuk menentang hanya sekedar menentang. Sifatnya sangat subyektif dan mungkin itikadnya kurang baik. Gerakan yang muncul dalam oposisionalisme akan cenderung bersifat *ad hominem* atau menyerang berdasarkan sisi pribadi seseorang, yang jika berlanjut akan menjadi pembunuhan karakter (*character assassination*). Oposisi loyal merupakan langkah untuk mengantisipasi munculnya oposisionalisme.²⁴

Nurcholish Madjid mengakui bahwa gagasan oposisi itu bukan orisinal dari dia. Sudah banyak kalangan intelektual yang membicarakannya. Prinsip Nurcholish Madjid menungkapkan kembali ide ini, karena di dalam demokrasi diperlukan *check and balances*. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa oposisi itu penting untuk menumbuhkan mekanisme pengawasan dan pengimbangan atau *check and balances*. Karenanya harus dilakukan secara formal dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal. Oposisi yang dimaksud di sini adalah oposisi yang terlembagakan secara formal, yaitu partai politik. Menurut Nurcholish Madjid, oposisi dalam konteks tersebut merupakan wujud modern dan ide demokrasi, dimana di dalam suatu

²¹ Syukron Jamal, "Islamic Modernization, Identity Politics and Religious Conservatism in Indonesia (Reflections on the Renewal of Nurcholish Madjid's Islamic Thought)," *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 1, no. 3 (2023): 187–96.

²² Choeroni Choeroni and Azwan Pratama, "Nurcholish Madjid's Thoughts on Islamic Politics in Indonesia," in *Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications*, 2020, 1–7, <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2291804>.

²³ Junaidi Junaidi, "PEMIKIRAN SPIRITUALISASI ISLAM MENURUT NURCHOLISH MADJID" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020).

²⁴ Windy Lidyarningsih and Muh. Hanif, "Nurcholish Madjid's Ideas on Renewal of Islamic Education in Indonesia," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)* 6, no. 2 (2023): 223–41, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol6.iss2.art6>.

masyarakat, oposisi adalah suatu kenyataan. Jika kelompok ini tidak diakui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman.

Madjid menunjuk contoh peran oposisi di negara Amerika Serikat. Dua kekuatan di parlemen Amerika, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, masing-masing bisa melembagakan peran oposisi dalam sistem pemerintahan mereka, jika kontestasi perebutan kekuasaan dimenangkan oleh satu di antara dua partai tersebut. Partai Republik bisa menjadi oposisi bagi Partai Demokrat, jika Partai Demokrat memenangkan pemilu, begitu juga sebaliknya.

Tegak dan robohnya suatu Negara sangat tergantung dari kuat dan lemahnya pemikiran politik yang dianut oleh Negara tersebut, karena pemikiran politik merupakan jenis pemikiran paling tinggi dalam suatu Negara. Ia adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat, Tingkat tertinggi dari pemikiran politik adalah pemikiran yang berhubungan dengan urusan rakyat dari sudut pandang tertentu. Aqidah Islam adalah suatu pemikiran politik, Oleh karenanya ia harus menjadi pondasi bagi pemikiran politik kaum Muslimin. Oleh karena itu pemikiran politik yang lemah dalam suatu Negara menyebabkan hancurnya Negara tersebut.²⁵

Gagasan Nurcholish Madjid telah mengukuhkan kesadaran baru bagi umat Islam terhadap Negara. Bahwa pembentukan suatu Negara Islam tidak menjadi perhatian utama.²⁶ Karena memiliki posisi strategis sebagai pengawas dan pengontrol pemerintahan, maka oposisi pun dianggap penting dalam pelaksanaan demokrasi terutama demokrasi materil yang mengutamakan aspek keberpihakan pemerintah kepada rakyat.²⁷ Eksistensi partai oposisi sangat erat kaitannya dengan keberadaan demokrasi. Sistem politik hanya dapat dikatakan demokatis jika di dalamnya terdapat partai oposisi. Sebaliknya, partai oposisi hanya dapat hidup dalam sistem demokrasi. *Dahl ...a political party is the most visible manifestation and surely one of the most effective forms of opposition in democratic country.*

²⁵ Muhamad Afrizal Sholichuddin, Nicky Estu Putu Muchtar, and Rizky Dwi Ratna, "The Relationship of Islam and The State in Contemporary Islamic Political Discourse in Indonesia," *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 78–88, <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>.

²⁶ Ferdi Yufriadi, Fadilla Syahrani, and Abdullah A Afifi, "Nurcholish Madjid's Neo-Modernism in Substantive Islamic Movements in Indonesia," *Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks* 1, no. December (2023): 53–62, <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.45>.

²⁷ Fred Cottrell, "Review of Political Oppositions in Western Democracies," in *Midwest Journal of Political Science*, ed. Robert A Dahl, vol. 11 ([Wiley, Midwest Political Science Association], 2024), 403–5, <https://doi.org/10.2307/2108619>.

D. SIMPULAN

Institusional oposisi didalam lembaga perwakilan rakyat Indonesia atau sistem pemerintahan sebagaimana diungkapkan Nurcholish Madjid agar ada dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dalam konteks kekinian masihlah sangat relevan. Bahkan oposisi itu sendiri adalah sebuah kebutuhan sebagai upaya menajamkan kontrol dan *check and balances* terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketiadaan oposisi bagi Nurcholish Madjid menimbulkan permasalahan ketatanegaraan berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi badan perwakilan, yakni fungsi kontrol dan *check and balances* yang dimandulkan. Bahkan Kuskridho Ambardi menyatakan bahwa ketiadaan oposisi yang efektif sebagai penjelmaan dari mekanisme *check and balances* menjadi salah satu ciri keberadaan politik kartel.

Lebih tegas Nurcholis Madjid mengatakan oposisi sangat berbeda dengan oposisionalisme yang sekedar menentang, sangat subjektif dan bahkan dengan itikad kurang baik, seperti kebiasaan mendaftarkan kesalahan orang lain. Bagi Nurcholis oposisi dalam semangat loyal, loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Nurcholish Madjid and Religious Pluralism in Indonesian Islam." In *Pluralism in Islamic Contexts - Ethics, Politics and Modern Challenges*, edited by Mohammed Hashas, 189–99. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66089-5_11.
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution : A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.
- Choeroni, Choeroni, and Azwan Pratama. "Nurcholish Madjid 's Thoughts on Islamic Politics in Indonesia." In *Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications*, 1–7, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2291804>.
- Cottrell, Fred. "Review of Political Oppositions in Western Democracies." In *Midwest Journal of Political Science*, edited by Robert A Dahl, 11:403–5. [Wiley, Midwest Political Science Association], 2024. <https://doi.org/10.2307/2108619>.

- Fukuoka, Yuki. "Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics." In *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51:480–82, 2015. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1111792>.
- Hariyanto, Benedictus Eric, Christophorus Rinovan Prasety Widi, and Paskalis Ronaldo. "Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke." *Akademika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 24, no. 1 (2019): 48–60.
- Huwaiti, Fahmi. *al-Islam wa al-Dimoqrathiyah*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1993.
- Jamal, Syukron. "Islamic Modernization, Identity Politics and Religious Conservatism in Indonesia (Reflections on the Renewal of Nurcholish Madjid's Islamic Thought)." *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 1, no. 3 (2023): 187–96.
- Junaidi, Junaidi. "PEMIKIRAN SPIRITUALISASI ISLAM MENURUT NURCHOLISH MADJID." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Khan, Arif, Saiful Islam, and Muhammad Alam. "The Role of Political Opposition : A Pre-Requisite for Democracy." *Journal of Humanities, Social And Management Sciences (JHSMS)* 2, no. 1 (2021): 63–71. <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/2.1.6>.
- Kuswanto, Kuswanto. "Consistency of the Presidential System in Indonesia." *Sriwijaya Law Review (SLRev)* 2, no. 2 (2018): 170–82. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.67.pp170-182>.
- Liddle, R William. "Review of Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia." In *Indonesia*, edited by Edward Aspinall, 175–79. Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2024. <http://www.jstor.org/stable/40376421>.
- Lidyaningsih, Windy, and Muh. Hanif. "Nurcholish Madjid's Ideas on Renewal of Islamic Education in Indonesia." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 6, no. 2 (2023): 223–41. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art6>.
- Lubis, Arbiyah. "Sunnatullah Dalam Pandangan Harun Nasution Dan Nurcholish Madjid." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 02 (2012): 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i02.51>.
- Madjid, Nurcholis. *Dialog Keterbukaan*. Paramadina, 1998.

- Mietzner, Marcus. "Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the Post-Suharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition." *Journal of Southeast Asian Studies* 39, no. 3 (2008): 431–53. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000337>.
- Munadi, Munadi. "Oposisi Dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.726>.
- Mutmainnah, Wardatul, and Siti Tiara Maulia. "Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 111–17. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.284>.
- Muur, Willem van der, Jacqueline Vel, Micah R Fisher, and Kathryn Robinson. "Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 379–96. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1669520>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Rahman, Fazlur. "THE RELIGIOUS SITUATION OF MECCA FROM THE EVE OF ISLAM UP TO THE HIJRA." In *Islamic Studies*, 16:289–301. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, 1977. <http://www.jstor.org/stable/20847048>.
- Reid, Anthony. "Political 'Tradition' in Indonesia: The One and the Many." *Asian Studies Review* 22, no. 1 (1998): 23–38. <https://doi.org/10.1080/10357829808713185>.
- Rohmawati, Yuyun. "ISLAM DAN NEO-MODERNISME/POST-MODERNISME (Perspektif Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid)." *Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2021): 60–71. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v20i1.4157>.
- Setiawan, Refly, Melinda Esti, and Viktor V Sidorov. "Islam and Politics in Indonesia." *RUDN Journal of Political Science* 22, no. 4 (2020): 731–40. <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740>.
- Sholichuddin, Muhamad Afrizal, Nicky Estu Putu Muchtar, and Rizky Dwi Ratna. "The Relationship of Islam and The State in Contemporary Islamic Political Discourse in Indonesia." *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 78–

88. <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>.

Yufriadi, Ferdi, Fadilla Syahrani, and Abdullah A Afifi. "Nurcholish Madjid's Neo-Modernism in Substantive Islamic Movements in Indonesia." *Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks* 1, no. December (2023): 53–62. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.45>.